

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Pemerintah Daerah harus mampu dan lebih aktif dalam mengelola daerahnya serta mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan.

Sejak diberikannya hak otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selanjutnya untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan. Pertama, pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua, untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang

publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo,2004:182).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat merancang dan menetapkan anggaran sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, Pemerintah Daerah memerlukan suatu alat perencanaan yang dapat menampung segala aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan suatu bentuk perencanaan keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Laporan APBD ini terdiri dari rincian pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Oleh karena itu, APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan di suatu daerah.

Selama ini penyusunan APBD seringkali mengabaikan kinerja keuangan dalam APBD. Anggaran Pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis kinerja keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Dari laporan tersebut dapat dilakukan analisis mengenai kinerja keuangan APBD. Analisis kinerja keuangan APBD dapat dilakukan dalam dua bagian,

yaitu Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dan analisis kinerja keuangan belanja daerah.

Secara khusus mengenai belanja daerah, belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai telah membuat Laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai. Berikut tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018 yang di analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, rasio terhadap total belanja operasi, rasio terhadap total belanja modal dan rasio efisiensi.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
2014	804.323.025.422,00	747.457.456.917,00	92,93%
2015	1.027.437.000.687,00	964.934.871.703,00	93,92%
2016	1.212.794.494.445,85	1.114.586.408.405,00	91,90%
2017	1.123.250.081.627,00	1.057.288.789.495,00	94,13%
2018	1.140.224.665.490,00	1.097.554.789.168,00	96,26%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai TA.2014-2018

Berdasarkan tabel 1.1 diatas Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa anggaran belanja lebih besar dari realisasi belanja. Hal ini ditunjukkan pada tabel di tahun 2014 anggaran belanja sebesar Rp.804.323.025.422,00; sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.747.457.456.917,00; dan persentase belanja sebesar 92,93%. Pada tahun 2015 anggaran belanja sebesar Rp.1.027.437.000.687,00; sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.964.934.871.703,00; dan persentase belanja sebesar 93,92%. Pada tahun 2016 anggaran belanja sebesar Rp.1.212.794.494.445,85; sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.1.114.586.408.405,00; dan persentase belanja sebesar 91,90%. Pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp.1.123.250.081.627,00; sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.1.057.288.789.495,00; dan persentase belanja sebesar 94,13%. Pada tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp.1.140.224.665.490,00;

sedangkan realisasi belanja Rp. 1.097.554.789.168,00; persentase belanja sebesar 96,26%.

Untuk tahun anggaran 2014 sampai tahun 2018 realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja hal ini ditunjukkan pada tabel 1.1 bahwa belum kondusifnya situasi perekonomian daerah dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha menyebabkan keraguan masyarakat dan dunia usaha melakukan investasi bagi pembangunan sektor swasta. Akibatnya, sebagian besar pembiayaan publik pembangunan dibebankan seluruhnya pada anggaran Pemerintah Daerah. Di satu sisi, anggaran pemerintah disediakan untuk membiayai dua sisi pengeluaran yaitu belanja bagi Aparatur Daerah untuk pelayanan rutin kepada masyarakat dan belanja publik untuk membiayai program/kegiatan pembangunan. Investasi sektor pemerintah masih menjadi fondasi utama pertumbuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengharapkan kedepannya setiap periodisasi pencapaian tujuan daerah dan aktivitas pemerintah daerah haruslah berorientasi pada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan orientasi dan pertanggungjawaban yang jelas serta searah dengan tujuan pembangunan.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauhmana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk

menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran melainkan berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Analisis pertumbuhan belanja daerah memberi informasi perkembangan belanja dari tahun ke tahun, rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran, sedangkan rasio efisiensi belanja akan memberikan informasi tentang penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dengan otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi daerah semakin meningkat. Berkaitan peran tersebut maka peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah kabupaten Manggarai.

Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Kinerja Belanja Daerah kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini